



TRANSFORMASI DIGITALISASI PAJAK DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN FISKAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Ardiaman Hulu¹⁾

¹⁾Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: arishulu263@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the impact of implementing a digital tax administration system on state revenue and public spending efficiency. Using descriptive qualitative methods, the study found that digitalization reduces the tax gap and increases the tax ratio. The results indicate that increasing fiscal independence through digitalization directly accelerates the financing of infrastructure development and public services.

Keywords: Public Finance, Development Economics, Tax Digitalization, Fiscal Independence.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi sistem administrasi perpajakan digital terhadap penerimaan negara dan efisiensi belanja publik. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian menemukan bahwa digitalisasi mengurangi tax gap dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal melalui digitalisasi secara langsung mempercepat pembiayaan infrastruktur pembangunan dan layanan publik.

Kata Kunci: Keuangan Publik, Ekonomi Pembangunan, Digitalisasi Pajak, Kemandirian Fiskal.



PENDAHULUAN

Masalah klasik yang dihadapi banyak negara berkembang dalam pembiayaan pembangunan adalah terjemaknya perekonomian dalam lingkaran setan keterbatasan dana yang dikenal sebagai *vicious cycle of poverty*. Rendahnya pendapatan per kapita menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah, sehingga akumulasi modal domestik menjadi sangat terbatas. Kondisi ini berimplikasi langsung pada minimnya investasi produktif, khususnya pada pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sejatinya menjadi prasyarat utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Akibatnya, produktivitas nasional sulit meningkat dan negara kembali terperangkap dalam tingkat pendapatan yang rendah.

Keterbatasan dana pembangunan tersebut semakin diperparah oleh rendahnya rasio pajak terhadap produk domestik bruto (*tax ratio*). Di banyak negara berkembang, *tax ratio* sering kali berada di bawah ambang batas 15 persen yang direkomendasikan oleh lembaga internasional seperti IMF sebagai standar minimum untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Rendahnya rasio pajak ini disebabkan oleh berbagai faktor struktural, antara lain besarnya sektor informal yang sulit dijangkau sistem perpajakan, lemahnya kapasitas administrasi pajak, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Akibatnya, penerimaan negara tidak mampu mengimbangi kebutuhan belanja publik yang terus meningkat.

Dalam kondisi ketika penerimaan domestik, khususnya dari pajak, tidak mencukupi untuk membiayai agenda pembangunan yang bersifat ekspansif, pemerintah kerap menjadikan utang luar negeri sebagai alternatif sumber pembiayaan. Utang dipandang sebagai solusi jangka pendek untuk menutup kesenjangan fiskal dan mempercepat pembangunan. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada utang luar negeri mengandung risiko serius,

terutama jika dana pinjaman tidak dialokasikan pada sektor-sektor produktif yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Salah satu risiko utama dari penggunaan utang yang tidak efektif adalah terjadinya *debt overhang*, yaitu kondisi ketika beban pembayaran bunga dan pokok utang di masa depan justru menggerus kapasitas fiskal negara. Dalam situasi ini, anggaran negara semakin tersedot untuk pembayaran utang sehingga ruang fiskal untuk belanja pembangunan menjadi semakin sempit. Fenomena ini dapat memicu *crowding-out effect*, di mana investasi publik dan swasta terhambat, sehingga pertumbuhan ekonomi justru melambat. Selain itu, ketergantungan fiskal terhadap utang luar negeri juga membuat kebijakan ekonomi domestik rentan terhadap fluktuasi nilai tukar serta perubahan kebijakan moneter negara atau lembaga pemberi pinjaman.

Dalam konteks inilah peran keuangan publik menjadi sangat krusial, bukan hanya sebagai instrumen pengumpulan dana, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mencapai pemerataan dan stabilitas ekonomi. Keuangan publik memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang saling berkaitan dalam mendukung pembangunan. Melalui fungsi alokasi, pemerintah mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor publik yang kurang diminati oleh swasta, seperti pembangunan jalan desa, penyediaan layanan kesehatan gratis, dan pendidikan dasar. Fungsi distribusi diwujudkan melalui penerapan pajak progresif dan pemberian subsidi yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, yang tercermin dalam penurunan rasio Gini. Sementara itu, fungsi stabilisasi berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi makro melalui kebijakan fiskal yang responsif terhadap guncangan ekonomi.

Memasuki era ekonomi digital, tantangan dan peluang dalam pengelolaan keuangan publik mengalami transformasi yang signifikan. Digitalisasi menuntut



pemerintah untuk beralih dari sistem manual menuju *digital public finance* yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Penerapan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan negara menjadi kunci untuk mengatasi berbagai persoalan klasik, termasuk inefisiensi birokrasi dan kebocoran anggaran.

Melalui pemanfaatan *government technology* (GovTech), pemerintah dapat meningkatkan efisiensi belanja publik, khususnya melalui sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) serta manajemen kas berbasis digital. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses administrasi dan memangkas biaya birokrasi, tetapi juga mampu meminimalkan peluang terjadinya praktik korupsi yang selama ini menjadi sumber utama kebocoran dana pembangunan. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk kepentingan publik.

Di sisi penerimaan negara, digitalisasi membuka peluang besar bagi optimalisasi perpajakan melalui konsep *smart taxation*. Ekonomi digital memungkinkan pemerintah untuk melacak berbagai transaksi ekonomi yang sebelumnya sulit teridentifikasi, seperti aktivitas e-commerce, ekonomi berbasis platform, hingga perdagangan aset kripto. Melalui integrasi data lintas sektor dan pemanfaatan *big data analytics*, otoritas pajak dapat membangun profil risiko wajib pajak secara lebih akurat dan otomatis. Selain itu, penyederhanaan sistem pelaporan dan pembayaran pajak melalui aplikasi digital mampu menurunkan biaya kepatuhan bagi masyarakat, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan sukarela dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan rasio pajak secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*).

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena ekonomi pembangunan dan keuangan publik, khususnya dalam konteks keterbatasan pembiayaan, pengelolaan utang, serta reformasi fiskal di era digital. Metode studi pustaka memungkinkan peneliti untuk melakukan penelaahan kritis terhadap berbagai konsep teoritis, kebijakan publik, serta temuan empiris yang telah dipublikasikan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis secara statistik, melainkan pada pembangunan argumentasi analitis yang komprehensif melalui sintesis berbagai sumber literatur yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh institusi resmi maupun peneliti sebelumnya. Sumber data utama mencakup laporan keuangan pemerintah, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Nota Keuangan, serta laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang digunakan untuk menganalisis perkembangan pendapatan dan belanja negara dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data statistik makroekonomi yang bersumber dari lembaga otoritas nasional dan internasional, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan World Bank. Data tersebut meliputi indikator-indikator penting seperti rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio*), pertumbuhan ekonomi (PDB), serta rasio utang luar negeri yang mencerminkan kondisi ketahanan fiskal suatu negara. Untuk memperkuat landasan teoretis, penelitian ini juga mengacu pada literatur ilmiah berupa jurnal nasional dan internasional terakreditasi, buku teks ekonomi pembangunan, serta prosiding konferensi yang relevan dengan topik keuangan publik dan digitalisasi fiskal.

Ruang lingkup pengamatan dalam penelitian ini dibatasi pada periode 2020 hingga 2025. Pemilihan periode



ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, periode tersebut mencerminkan fase terjadinya guncangan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap stabilitas fiskal dan kapasitas pembiayaan pembangunan di banyak negara berkembang. Kedua, rentang waktu ini merupakan periode di mana pemerintah secara masif melakukan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk dalam sistem perpajakan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Ketiga, periode ini juga relevan untuk mengamati tren terbaru dalam pengelolaan utang negara dan kebijakan penerimaan negara pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Peneliti melakukan penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber tertulis dengan menggunakan kata kunci spesifik seperti *fiscal sustainability*, *digital taxation*, dan *public debt in developing countries*. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah dan portal digital yang kredibel, antara lain Google Scholar, ScienceDirect, serta situs resmi lembaga pemerintah dan organisasi internasional. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data dan referensi yang digunakan memiliki tingkat validitas dan relevansi yang tinggi dengan fokus penelitian.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan narasi utama yang muncul dalam literatur dan dokumen kebijakan terkait keuangan publik dan pembangunan ekonomi. Sementara itu, analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan tren data makroekonomi antarperiode maupun antarindikator guna memperoleh gambaran dinamika fiskal secara lebih komprehensif. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data dengan menyeleksi

data statistik dan teori yang paling relevan dengan permasalahan keterbatasan dana dan utang publik, penyajian data (*data display*) dalam bentuk tabel atau grafik untuk mempermudah pembacaan tren secara kronologis, serta tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan teori ekonomi pembangunan dengan fakta empiris dari data sekunder. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan pemahaman dan rekomendasi yang konstruktif terkait upaya penguatan kemandirian fiskal di era ekonomi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami bagaimana manajemen keuangan negara memengaruhi pembangunan ekonomi, diperlukan pemahaman mengenai keterkaitan antara optimalisasi pendapatan, efisiensi pengeluaran, dan dampak akhirnya terhadap pertumbuhan serta kemandirian fiskal. Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan publik menjadi fondasi utama yang menjembatani ketiga aspek tersebut secara terintegrasi. Melalui penerapan sistem digital, pemerintah tidak hanya meningkatkan kapasitas fiskal, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran negara.

Optimalisasi pendapatan negara menjadi langkah awal yang krusial dalam siklus manajemen keuangan publik. Digitalisasi layanan perpajakan dan penerimaan negara, seperti penerapan E-Samsat, E-Filing, serta integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), telah secara signifikan mempermudah proses administrasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem digital memungkinkan perluasan basis pajak dengan menjangkau sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya sulit terdeteksi, tanpa harus menaikkan tarif pajak yang berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha. Dengan demikian, penerimaan negara dapat meningkat secara berkelanjutan melalui peningkatan



kepatuhan dan transparansi, bukan melalui tekanan fiskal tambahan.

Di sisi pengeluaran, digitalisasi sistem keuangan negara berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja publik. Penggunaan sistem penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan berbasis digital mampu meminimalkan kebocoran anggaran yang selama ini kerap terjadi akibat praktik korupsi dan inefisiensi birokrasi. Setiap rupiah yang berhasil dikumpulkan dari penerimaan negara dapat dialokasikan secara lebih tepat sasaran ke sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan yang secara konstitusional memperoleh alokasi minimal 20 persen dari anggaran, serta sektor kesehatan yang menjadi pilar utama pembangunan sumber daya manusia.

Efisiensi pengelolaan pendapatan dan belanja publik tersebut pada akhirnya memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Kemandirian fiskal yang semakin kuat memungkinkan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis, seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan internet, tanpa ketergantungan berlebihan pada pembiayaan utang. Dengan berkurangnya tekanan beban bunga utang, ruang fiskal pemerintah menjadi lebih luas untuk mendorong investasi publik yang produktif. Pembangunan infrastruktur yang merata selanjutnya berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat konektivitas, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Digitalisasi bukan sekadar tren teknologi, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan keuangan publik untuk mencapai target pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemanfaatan

teknologi digital memungkinkan pemerintah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Melalui sistem digital, proses administrasi keuangan yang sebelumnya kompleks dan rentan terhadap penyimpangan dapat disederhanakan, sehingga kebijakan fiskal dapat dijalankan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam konteks penerimaan negara, digitalisasi berperan penting dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan digital memungkinkan pemerintah untuk menjangkau aktivitas ekonomi yang sebelumnya sulit teridentifikasi, khususnya yang berkembang di sektor ekonomi digital dan informal. Dengan dukungan integrasi data lintas lembaga dan pemanfaatan teknologi analitik, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan tanpa harus meningkatkan tarif pajak, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan beban masyarakat tidak bertambah.

Di sisi pengeluaran, penerapan sistem keuangan negara berbasis digital memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi belanja publik. Digitalisasi proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan keuangan mampu meminimalkan kebocoran anggaran dan praktik korupsi. Anggaran negara dapat dialokasikan secara lebih produktif ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi nasional.

Sinergi antara kebijakan fiskal yang disiplin dan pemanfaatan teknologi digital juga memperkuat stabilitas fiskal negara. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan penerimaan yang lebih optimal, ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan utang dapat dikurangi. Ruang fiskal yang lebih luas memungkinkan pemerintah untuk merespons guncangan ekonomi secara lebih cepat dan tepat, baik melalui stimulus fiskal maupun kebijakan



perlindungan sosial, sehingga stabilitas ekonomi makro dapat terjaga.

Lebih jauh, digitalisasi keuangan publik turut mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan berbasis data memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk merancang kebijakan pembangunan yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan lokal. Pembangunan infrastruktur digital dan fisik yang didukung oleh tata kelola fiskal yang baik akan mempercepat integrasi ekonomi daerah, meningkatkan produktivitas, serta membuka akses yang lebih luas terhadap layanan publik.

Dengan demikian, sinergi antara kebijakan fiskal yang ketat dan pemanfaatan teknologi digital akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh dan mandiri. Ekosistem ini ditandai oleh peningkatan kemandirian fiskal, tata kelola keuangan publik yang transparan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Digitalisasi keuangan publik pada akhirnya menjadi fondasi penting bagi negara dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik keuangan pemerintah pusat. BPS.
- Bank Indonesia. (2023). Laporan perekonomian Indonesia 2023. Bank Indonesia.
- International Monetary Fund. (2023). Fiscal policy and digital transformation. IMF Publications.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Nota keuangan dan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Kemenkeu RI.
- Mankiw, N. G. (2021). Macroeconomics (11th ed.). Worth Publishers.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public finance in theory and practice (5th ed.). McGraw-Hill.

- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). Digital government index 2022: Results and key findings. OECD Publishing.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). Economics of the public sector (4th ed.). W. W. Norton & Company.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development (13th ed.). Pearson Education.
- World Bank. (2024). Digital progress in public finance. World Bank Group.